

Implementasi perlindungan penyandang disabilitas KRL Comutter Line (trayek Jakarta Kota Bekasi) ditinjau dari undang undang nomor 8 tahun 1999 dan undang undang 23 tahun 2007 = Implementation of protection with disabilities KRL Commuter Line route Jakarta City Bekasi viewed from law number 8 of 1999 and the law 23 of 2007

Sitohang, Harun Julianto Christianson, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423068&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

KRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas. Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitas ini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ketentuan tentang standarisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

<hr><i>ABSTRACT</i>

KRL Commuter Line is one of mass transportation that is consumed by the public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existence is very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRL Commuterline to do activities or on the move. It is unfortunate the government to be less concerned about the presence of persons with disabilities, this can be seen from the lack of facilities and pre-facilities in KRL Commuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem, in terms of legislation, the provisions on product standardization, as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers, particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999.</i>